

Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)

E-ISSN: 2986-9528 | P-ISSN: 2986-9439
Website <https://ejournal.lapad.id/index.php/pjpi>

Open Access under CC BY NC SA
Copyright © 2026, Hendro Perdana Putra, et.al

Vol. 4, No. 1, 2026, 47-58
DOI: <https://doi.org/10.61930/pjpi.v4i1>

Model Analisis Kebijakan Dalam Pendidikan: Studi Teoritis Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam

Hendro Perdana Putra^{1*}, Sri Susmiati², Sabran³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris, Samarinda, Indonesia

Email: ibnmasud92@gmail.com, srisusmiyati@gmail.com, sabran@gmail.ac.id

Abstract:

This article examines the main models of policy analysis (rational/comprehensive, incremental, mixed scanning, dual-stream, advocacy coalition, and implementation models) and their implications for Islamic Religious Education (PAI) policy. Using desk research and a content analysis approach, this study synthesizes classic theoretical and recent empirical studies to develop a framework applicable to the formulation, implementation, and evaluation of PAI policies. The findings suggest that a combination of (complementary) models – specifically the application of mixed scanning for formulation, dual-stream to explain agenda-setting, and advocacy coalition to understand resistance/subsystems is most effective when accompanied by adaptive implementation mechanisms and evidence-based evaluation. Recommendations focus on designing PAI policies that are theologically and juridically sensitive, participatory, and systematic in their monitoring-implementation feedback cycle.

Keywords: Policy Analysis, Education

Abstrak:

Artikel ini mengkaji model-model utama analisis kebijakan (rasional/komprehensif, inkremental, pemindaian campuran, dobel jalur, koalisi advokasi, dan model implementasi) dan implikasinya terhadap kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI). Dengan menggunakan riset pustaka dan pendekatan content analysis, studi ini mengumpulkan studi teoritis klasik dan studi empiris terbaru untuk merumuskan kerangka kerja yang dapat diterapkan untuk perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan PAI. Temuan menunjukkan bahwa kombinasi model pemindaian campuran untuk perumusan, aliran ganda untuk menjelaskan penetapan agenda, dan koalisi advokasi untuk memahami resistensi/subsistem paling efektif bila disertai dengan mekanisme implementasi adaptif dan evaluasi berbasis bukti. Rekomendasi berfokus pada perancangan kebijakan PAI yang peka secara teologis dan yuridis, partisipatif, dan sistematis dalam siklus umpan balik pemantauan-implementasinya.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) menempati posisi strategis dalam pengembangan karakter dan identitas bagi komunitas Muslim di negara-negara mayoritas Muslim. Kebijakan PAI bukan hanya masalah kurikulum teknis, tetapi juga menyentuh aspek teologis, hukum, sosial, dan politik (Setiawan et al., 2022). Oleh karena itu, studi teoritis dan model analisis kebijakan yang tepat sangat penting untuk merancang kebijakan yang sah secara agama, sesuai dengan hukum negara, dan diimplementasikan secara efektif. Sumber-sumber Islam memberikan landasan bagi nilai-nilai dan tujuan pendidikan yaitu untuk mendidik individu yang saleh, bermoral luhur, dan mampu berkontribusi kepada Masyarakat (Madhar, 2024). Kebijakan PAI idealnya menerjemahkan *maqasid al-shari'ah* (tujuan hukum Islam) ke dalam ranah Pendidikan, misalnya, tujuan pendidikan yang mengintegrasikan pengembangan moral, kompetensi keagamaan, dan kompetensi sosial-ekonomi (Ardiansyah, 2019). Negara-negara dengan sistem pendidikan campuran (sekuler dan religius) mengatur PAI melalui peraturan kurikulum nasional, peran Kementerian Pendidikan dan/atau Kementerian Agama, dan peraturan regional. Di Indonesia, pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan kebijakan terkait seperti integrasi PAI ke dalam kurikulum nasional, peran madrasah, dan regulasi guru PAI menunjukkan dinamika antara kepentingan negara dan tuntutan komunitas agama (Kemendikbud, 2013). Studi terbaru tentang kebijakan PAI di Indonesia menekankan perlunya menyelaraskan standar nasional dengan kekhususan lokal pesantren/madrasah Islam (Istiyani, 2017).

Secara teoritis, studi kebijakan publik telah menghasilkan beberapa model kunci yang memandu analisis kebijakan. Model rasional menuntut analisis mendalam tentang alternatif dan analisis biaya-manfaat; model inkremental menekankan perubahan kecil dan langkah-langkah inkremental ketika rasionalitas dan informasi yang terbatas menghambat solusi radikal; model pemindaian campuran menawarkan perpaduan keduanya, dengan pemindaian luas yang dipadukan dengan analisis rinci tentang isu-isu inti; Model aliran berganda menjelaskan bagaimana aliran masalah, kebijakan, dan politik bertemu untuk membuka jendela kebijakan; kerangka kerja koalisi advokasi menggambarkan peran kelompok ideologis/koalisi advokasi dalam memandu kebijakan jangka panjang; dan literatur implementasi menyoroti titik kegagalan implementasi kebijakan multi-aktor. Referensi klasik dan pembaruan teoretis terhadap model-model ini

membentuk dasar utama analisis ini. Contoh-contoh penting yang digunakan di sini termasuk karya Charles E. Lindblom (inkrementalisme), Amitai Etzioni (pemindaian campuran), John Kingdon (aliran berganda), dan Paul Sabatier (koalisi advokasi). Karya-karya ini disintesis dengan studi kontemporer dalam publikasi pendidikan untuk menghasilkan kontribusi teoretis yang relevan bagi Pendidikan Agama Islam (PAI). Beberapa kasus nyata menggambarkan tantangan kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI): (1) tekanan untuk menyesuaikan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan perubahan kebijakan nasional; (2) konflik antara Kementerian Pendidikan dan pemangku kepentingan pesantren/madrasah; (3) masalah implementasi di lapangan, seperti ketersediaan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berkualitas; dan (4) penolakan publik terhadap perubahan tertentu misalnya, pengurangan jam Pendidikan Agama Islam atau revisi materi (Nurhasanah, 2018). Laporan, artikel, dan penelitian tentang pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan dinamika implementasinya di berbagai wilayah menunjukkan kompleksitas subsistem kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan kebutuhan akan pendekatan analitis berlapis-lapis. Banyak studi PAI cenderung deskriptif, antara lain penelitian Abdullah (2013), yang mengurai isi kurikulum, kemudian penelitian Nasiruddin (2023) yang mendalami studi implementasi spesifik. Artikel ini berupaya mengisi celah dengan: (1) mensintesis model-model analisis kebijakan publik klasik dan kontemporer secara komparatif untuk konteks PAI; (2) mengusulkan kerangka integratif yang menggabungkan *mixed-scanning* (sebagai strategi perumusan), *multiple streams* (untuk menjelaskan agenda setting dan momen perubahan), dan *advocacy coalition* (untuk memahami resistensi dan learning jangka panjang); serta (3) menerjemahkan implikasi operasionalnya dalam rekomendasi kebijakan PAI yang berlandaskan teologi, legalitas, dan bukti empiris. Dengan demikian kontribusi artikel ini bersifat teoritik-aplikatif yang ditujukan untuk pembuat kebijakan, akademisi PAI, dan pemangku kepentingan madrasah/pesantren.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *library research* (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan analisis konten (*content analysis*) (Sugiyono, 2017). Data primer berupa teks akademik dan artikel berita yang relevan sebagai ilustrasi kasus empiris. Sampel literatur dipilih secara purposive, teks-teks seminal dan artikel empiris 10–15 tahun terakhir yang

membahas model analisis kebijakan, pendidikan, dan kebijakan PAI. Analisis konten yang digunakan mengacu pada prinsip-prinsip metodologis modern (Holsti, 1969), unit analisis didefinisikan, unit sampling, unit coding, dan prosedur reliabilitas untuk memastikan konsistensi interpretasi.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Peta model dan relevansi untuk PAI

Kajian mengenai kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak dapat dilepaskan dari kerangka teoritis kebijakan publik yang menjelaskan bagaimana suatu kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Dalam konteks ini, berbagai model kebijakan memberikan perspektif yang beragam untuk memahami kompleksitas proses pengambilan keputusan, aktor yang terlibat, serta dinamika sosial-politik yang memengaruhi arah kebijakan pendidikan Islam. PAI sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki karakteristik khas yang tidak hanya bersifat pedagogis, tetapi juga normatif dan ideologis, sehingga proses kebijakannya cenderung lebih kompleks dibandingkan bidang pendidikan lainnya. Hal ini menuntut pendekatan analisis yang tidak tunggal, melainkan integratif dengan memanfaatkan berbagai model kebijakan yang relevan. Berdasarkan analisis data dan kajian literatur, dapat diidentifikasi sejumlah model kebijakan utama yang secara konseptual dan empiris memiliki relevansi kuat dalam konteks PAI. Model-model ini tidak hanya membantu menjelaskan pola-pola kebijakan yang telah terjadi, tetapi juga memberikan kerangka analitis untuk merumuskan kebijakan PAI yang lebih adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan. Analisis data menunjukkan enam cluster utama model kebijakan yang relevan untuk PAI:

1) Model Rasional

Model rasional menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan yang sistematis, berbasis pada identifikasi masalah secara komprehensif, penyusunan berbagai alternatif kebijakan, serta evaluasi rasional melalui analisis biaya-manfaat. Model ini berasumsi bahwa pembuat kebijakan memiliki informasi yang lengkap dan mampu bertindak secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Setiabudi et al., 2025). Dalam konteks PAI, model ini sangat relevan untuk pengembangan kebijakan strategis seperti desain kurikulum terpadu, standardisasi

kompetensi lulusan, serta evaluasi berbasis capaian pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan adanya perencanaan yang lebih terukur dan akuntabel. Namun demikian, keterbatasan model ini terletak pada asumsi rasionalitas penuh yang dalam praktiknya seringkali sulit terpenuhi, terutama dalam lingkungan kebijakan yang kompleks dan sarat nilai seperti pendidikan Islam.

2) Model Incremental Lindblom

Model incremental yang diperkenalkan oleh Lindblom memandang kebijakan sebagai hasil dari proses penyesuaian bertahap (*muddling through*), yang terjadi karena keterbatasan informasi, kapasitas analisis, serta adanya tekanan politik dan sosial (Yulfianti et al., 2025). Dalam praktik PAI, pendekatan ini sangat dominan, terutama dalam perubahan kurikulum yang cenderung evolutif daripada revolusioner. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara berbagai aktor kebijakan, seperti pemerintah, organisasi masyarakat Islam, dan lembaga pendidikan berbasis pesantren. Keunggulan model ini terletak pada kemampuannya mengurangi resistensi dan menjaga stabilitas sistem, namun di sisi lain dapat menghambat inovasi dan reformasi yang bersifat mendasar.

3) Mixed-Scanning Etzioni

Model *mixed-scanning* yang dikembangkan oleh Etzioni menggabungkan pendekatan rasional dan incremental melalui dua tahap analisis, yaitu pemindaian luas (*broad scanning*) untuk mengidentifikasi isu strategis, serta analisis mendalam (*focused analysis*) terhadap alternatif kebijakan yang dianggap paling relevan (Fihrisi & Suwardi, 2025). Dalam konteks PAI, model ini menawarkan pendekatan yang lebih realistis dan aplikatif. Misalnya, pemerintah dapat melakukan pemetaan nasional terkait permasalahan PAI seperti kualitas guru, ketimpangan akses pendidikan, serta sensitivitas materi ajar, kemudian dilanjutkan dengan kajian mendalam terhadap opsi kebijakan tertentu seperti reformulasi kurikulum atau penguatan pelatihan guru. Model ini dinilai efektif karena mampu mengakomodasi kompleksitas kebijakan tanpa kehilangan arah strategis.

4) Multiple Streams Kingdon

Model *Multiple Streams Approach* (MSA) yang dikemukakan oleh Kingdon menjelaskan bahwa kebijakan publik terbentuk melalui pertemuan tiga arus utama, yaitu problem stream (masalah), policy stream (solusi), dan politics stream (kondisi

politik), yang pada momen tertentu menciptakan "*policy window*" (Aziz et al., 2020). Dalam kebijakan PAI, fenomena ini dapat diamati ketika isu-isu keagamaan atau pendidikan menjadi perhatian publik, didukung oleh solusi kebijakan yang telah tersedia, serta adanya momentum politik yang memungkinkan perubahan. Model ini sangat membantu dalam menjelaskan mengapa perubahan kebijakan PAI seringkali bersifat episodik dan tidak linier. Studi empiris menunjukkan bahwa banyak reformasi pendidikan Islam terjadi bukan semata karena perencanaan teknokratis, tetapi karena adanya konvergensi ketiga arus tersebut.

5) *Advocacy Coalition Framework* Sabatier

Advocacy Coalition Framework (ACF) menekankan bahwa kebijakan publik dibentuk oleh interaksi berbagai koalisi advokasi yang memiliki keyakinan dasar (*belief systems*) yang relatif stabil dalam jangka panjang (Fawzi et al., 2022). Dalam konteks PAI, subsistem kebijakan diwarnai oleh keberadaan berbagai kelompok seperti organisasi masyarakat Islam, lembaga pesantren, akademisi, serta birokrasi pendidikan. Masing-masing aktor membawa nilai, ideologi, dan kepentingan yang memengaruhi arah kebijakan. Model ini sangat relevan untuk menjelaskan dinamika konsolidasi nilai keislaman, serta resistensi terhadap perubahan kurikulum yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tertentu. Dengan demikian, ACF memberikan perspektif penting tentang dimensi ideologis dan sosial dalam kebijakan PAI.

6) Model Implementasi Pressman & Wildavsky

Model implementasi yang dikembangkan oleh Pressman dan Wildavsky menyoroti kompleksitas proses implementasi kebijakan, khususnya melalui identifikasi titik-titik kritis (*clearance points*) dalam rantai pelaksanaan kebijakan (Rahmawati & Maghfirah, 2025). Dalam praktik PAI, banyak kebijakan yang secara konseptual sudah baik, namun mengalami kegagalan pada tahap implementasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan distribusi guru yang berkualifikasi, ketidaksesuaian alokasi pembiayaan, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, serta rendahnya kapasitas kelembagaan di tingkat daerah. Oleh karena itu, model ini menekankan pentingnya desain implementasi yang realistis, koordinasi lintas sektor, serta penetapan indikator kinerja yang terukur.

Studi literatur dan laporan kebijakan di Indonesia dan Malaysia menunjukkan pola-pola di atas: perubahan kurikulum PAI sering terjadi secara inkremental dengan momen perubahan (*policy window*) ketika isu politik atau sosial memaksa pembuat kebijakan untuk bertindak. Selain itu, studi empiris pada madrasah/pesantren menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada ketersediaan guru PAI berkualifikasi dan integrasi kebijakan di tingkat daerah.

2. Diskusi Model per Tahap Kebijakan PAI

1. Perumusan Kebijakan: dari Rasional ke *Mixed-Scanning*

Perumusan kebijakan PAI pada dasarnya tidak dapat hanya mengandalkan model rasional murni, melainkan perlu mengintegrasikan pendekatan *mixed-scanning* sebagai strategi yang lebih adaptif. Secara normatif, model rasional menuntut adanya analisis alternatif kebijakan yang komprehensif, berbasis data, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Namun, dalam konteks PAI, kompleksitas nilai menjadi faktor pembeda utama, karena kebijakan tidak hanya dinilai dari aspek teknokratis, tetapi juga kesesuaian dengan prinsip-prinsip teologis dan norma keislaman. Oleh karena itu, proses perumusan kebijakan PAI memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup kajian tekstual terhadap sumber-sumber ajaran Islam, serta konsultasi dengan ulama dan lembaga keagamaan sebagai bentuk validasi normatif (aspek yuridis-teologis) (Mubarak et al., 2024). Di sisi lain, keterbatasan informasi, waktu, dan sumber daya menjadikan penerapan rasionalitas penuh seringkali tidak realistis. Dalam konteks ini, *mixed-scanning* menawarkan solusi kompromi yang strategis, yaitu dengan menggabungkan pemindaian luas terhadap isu-isu makro (seperti kesenjangan akses, kualitas guru, dan kebutuhan masyarakat) dengan analisis mendalam pada alternatif kebijakan prioritas. Secara operasional, langkah *mixed-scanning* dalam PAI dapat dirumuskan sebagai berikut: (a) *environmental scanning* pada level nasional dan regional, (b) pemetaan pemangku kepentingan (ulama, ormas Islam, birokrasi pendidikan, dan pesantren), (c) seleksi awal alternatif kebijakan (*shortlisting*), (d) kajian mendalam terhadap 2-3 alternatif utama (misalnya desain kurikulum atau model pelatihan guru), serta (e) uji coba terbatas (*pilot project*) pada wilayah representative (Mukmin, Subakti, et al., 2024). Literatur kebijakan menunjukkan bahwa

pendekatan ini mampu mengurangi kecenderungan konservatisme dalam model incremental, sekaligus tetap mempertahankan realisme dalam keterbatasan sumber daya.

2. Agenda Setting: *Multiple Streams* dalam Konteks PAI

Multiple Streams Approach (MSA) memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami dinamika penetapan agenda dalam kebijakan PAI. Model ini menekankan bahwa suatu isu dapat naik menjadi prioritas kebijakan ketika terjadi konvergensi antara tiga arus utama, yaitu *problem stream*, *policy stream*, dan *politics stream* (Simarmata et al., 2026). Dalam konteks PAI, fenomena ini dapat dijelaskan melalui berbagai skenario empiris. Misalnya, meningkatnya kekhawatiran publik terhadap degradasi moral yang tercermin dalam indikator sosial tertentu (*problem stream*), disertai dengan tersedianya rancangan solusi berupa inovasi kurikulum atau pendekatan pedagogi baru oleh para ahli PAI (*policy stream*), serta diperkuat oleh tekanan politik dari aktor-aktor strategis seperti pemerintah daerah, partai politik, atau media (*politics stream*). Ketika ketiga arus ini bertemu, maka terbuka "*policy window*" yang memungkinkan terjadinya perubahan kebijakan (Achmad & Yenuri, 2025). Implikasi praktis dari model ini adalah pentingnya kesiapan aktor kebijakan PAI dalam merumuskan proposal kebijakan yang matang dan siap diimplementasikan ketika momentum kebijakan muncul. Dengan kata lain, keberhasilan agenda setting tidak hanya bergantung pada urgensi masalah, tetapi juga pada kesiapan solusi dan konteks politik yang mendukung.

3. Peran Aktor dan Koalisi: *Advocacy Coalition Framework*

Dalam subsistem kebijakan PAI, peran aktor tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai dan keyakinan yang mereka anut. *Advocacy Coalition Framework* (ACF) menjelaskan bahwa kebijakan publik terbentuk melalui interaksi berbagai koalisi advokasi yang memiliki *belief systems* yang relatif stabil dalam jangka panjang. Dalam konteks PAI, aktor-aktor seperti organisasi masyarakat Islam, pesantren, akademisi, serta birokrasi pendidikan membentuk koalisi yang memengaruhi arah kebijakan. Dinamika ini seringkali menghasilkan proses tarik-menarik antara kepentingan ideologis, pedagogis, dan politis. Perubahan kebijakan yang signifikan umumnya tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses pembelajaran kebijakan (*policy-oriented learning*) yang berlangsung secara gradual (Mukmin et al., 2026). Implikasi praktis dari pendekatan ini

adalah pentingnya strategi kolaboratif dalam perumusan kebijakan PAI. Pembuat kebijakan perlu mengidentifikasi konfigurasi koalisi yang ada, membangun aliansi dengan aktor-aktor kunci—terutama tokoh agama moderat dan lembaga akademik—serta menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi resistensi, tetapi juga meningkatkan legitimasi kebijakan yang dihasilkan.

4. Implementasi: titik kritis dan *clearance points*

Tahap implementasi merupakan fase paling krusial dalam siklus kebijakan PAI, karena pada tahap inilah kebijakan diuji dalam realitas lapangan. Model implementasi menekankan adanya berbagai titik kritis (*clearance points*) yang harus dilalui agar kebijakan dapat berjalan secara efektif. Dalam konteks PAI, *clearance points* dapat diidentifikasi pada berbagai level, antara lain: (1) persetujuan kebijakan pada tingkat pusat terkait standar dan regulasi, (2) alokasi anggaran di tingkat daerah, khususnya untuk pelatihan dan pengembangan guru, (3) komitmen kepala sekolah atau madrasah dalam mengimplementasikan kebijakan, (4) kesiapan dan kemampuan guru dalam mengadopsi metode pembelajaran baru, serta (5) penerimaan dari orang tua dan masyarakat terhadap materi dan pendekatan yang digunakan. Kegagalan pada salah satu titik ini dapat menyebabkan terhambatnya implementasi secara keseluruhan (Mukmin et al., 2026). Oleh karena itu, diperlukan desain implementasi yang komprehensif, mencakup mekanisme koordinasi lintas sektor, program penguatan kapasitas (*capacity building*), serta penetapan indikator kinerja yang realistis dan terukur.

5. Evaluasi dan *Feedback Loop*: dari *Evidence to Policy Learning*

Evaluasi kebijakan PAI merupakan tahap penting yang tidak hanya berfungsi untuk mengukur keberhasilan, tetapi juga sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Evaluasi perlu dirancang secara komprehensif dengan mengintegrasikan indikator jangka pendek dan jangka panjang. Indikator jangka pendek dapat mencakup aspek input dan proses, seperti ketersediaan guru yang kompeten, kualitas bahan ajar, serta alokasi waktu pembelajaran. Sementara itu, indikator jangka panjang lebih menekankan pada outcome, seperti capaian karakter peserta didik, tingkat literasi keagamaan, serta internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari (Mukmin, Suharman, et al., 2024). Analisis terhadap berbagai studi evaluasi kebijakan pendidikan menunjukkan pentingnya penggunaan data

kuantitatif dan kualitatif secara simultan untuk mendukung proses *policy-oriented learning*. Dalam konteks ini, evaluasi tidak boleh bersifat ad hoc, melainkan harus menjadi bagian integral (*built-in*) dari desain kebijakan sejak awal. Rekomendasi implementatif mencakup pengembangan sistem pengumpulan data yang sistematis (melalui survei guru dan siswa, observasi kelas, serta asesmen kompetensi PAI), serta penyelenggaraan forum evaluasi yang melibatkan berbagai koalisi advokasi. Dengan demikian, hasil evaluasi tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai dasar transformasi kebijakan yang lebih responsif dan adaptif.

SIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa tidak ada satu model analisis kebijakan yang sempurna untuk PAI pendekatan terintegrasi lebih realistis: *mixed-scanning* untuk perumusan, *multiple streams* untuk memahami agenda, *advocacy coalition* untuk daya tahan nilai dan pembelajaran jangka panjang, serta perhatian serius pada titik-titik implementasi (*clearance points*). Kebijakan PAI yang efektif harus menggabungkan sensitivitas teologis-yuridis, partisipasi aktor, desain implementasi yang operasional, dan evaluasi berbasis bukti. Rekomendasi operasional disajikan untuk pembuat kebijakan, praktisi madrasah/pesantren, dan akademisi PAI

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2013). Konsep pengembangan pendidikan Islam (telaah kritis terhadap pengembangan lembaga pendidikan madrasah dan pondok pesantren. *Oneresearch*, 2(2).
- Achmad, N. S., & Yenuri, A. A. (2025). Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam Konteks Multireligius: Studi Kasus di SMA Semen Gresik. *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 10(3). <https://doi.org/10.55102/alyasini.v10i3.6689>
- Al Arifi, N., Iskandar, I., & Asiah, S. N. (2023). Pendidikan Karakter Demokratis Melalui Media Dialog Orangtua-Anak Dalam Al Qur'an. *Jurnal Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Borneo*, 4(1), 127-134.
- Ardiansyah, M. (2019). The Concept of Adâb by Syed Muhammad Naquib Al-Attas and Its Relevance to Education in Indonesia. *Ibn Khaldun Journal of Social Science*, 1, 58.
- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyantri, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192-201. <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i2.2575>
- Fawzi, T., Ahid, N., Abdullah, A. A., & Muhtadin, M. A. (2022). Desain Kurikulum

Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 12026–12036. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10272>

Fihriani, F., & Suwardi, S. (2025). Analisis Evaluatif Moderasi Beragama: Tantangan Tata Kelola, Dilema Wacana, dan Rekomendasi Penguatan Kebijakan. *CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(11), 1980–1989. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i11.1914>

Holsti, O. R. (1969). *Content Analysis For The Social Science And Humanities*. Massachusetts: Westley Publishing.

Istiyani, D. (2017). Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia. *Edukasia Islamika : Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 127–145. <https://doi.org/10.28918/jei.v2i1.1665>

Kemendikbud. (2013). *UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003*. Kemendikbud.

Madhar, M. (2024). Pemikiran Pendidikan Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dalam Sistem Pendidikan Islam Kontemporer. *Tarqiyatuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Madrasah Ibtidaiyah*, 3(2), 115–126. <https://doi.org/10.36769/tarqiyatuna.v3i2.813>

Mubarak, M., Mukmin, M., Subakti, H., Ihsan, M., Rosita, R., Rosadi, K., ... Taufik, M. (2024). *Implementasi Teknologi dalam Pendidikan Agama Islam di Era Society 5.0*. Yayasan Kita Menulis. Retrieved from <https://scholar.google.com/scholar?cluster=405149272555831901&hl=en&oi=scholar>

Mukmin, M., Subakti, H., Rosadi, K., Nuraini, N., Maryam, M., Al Arifi, N., ... Misran, M. (2024). *Metode Khusus Pembelajaran PAI di Abad 21*. Yayasan Kita Menulis. Retrieved from <https://scholar.google.com/scholar?cluster=10438212438346292354&hl=en&oi=scholar>

Mukmin, M., Suharman, S., Riadi, A., Nasrullah, A., Maryam, M., Al Arifi, N., ... Sukeriyadi, M. (2024). *Metode Pembelajaran PAI Berbasis Artificial Intelligence di Era Society 5.0*. Yayasan Kita Menulis. Retrieved from <https://scholar.google.com/scholar?cluster=9436531668900260375&hl=en&oi=scholar>

Mukmin, M., Taufik, M., Ansya, Y. A., Rosadi, K., Suharman, S., Sukeriyadi, M., ... Al Haddar, G. (2026). *Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti Berbasis Deep Learning*. Yayasan Kita Menulis. Retrieved from <https://scholar.google.com/scholar?cluster=3371680947280745126&hl=en&oi=scholar>

Nurhasanah, S. (2018). *Tantangan Dan Problematika Pendidikan Islam*. 3(2).

Rahmawati, R. F., & Maghfirah, N. (2025). Determination of Institutional and Individual Factors for the Implementation of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 9(2), 476–489. <https://doi.org/10.35723/ajie.v9i2.169>

Setiabudi, A., Nurmalisa, Danuarta, M. R., & Lestari, Y. (2025). Penerapan Model Rasional dalam Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah pada Era Kurikulum Merdeka. *Journal of Education and Culture*, 5(3), 19–29.

- Setiawan, D., Aziz, S. A., & Hilman, C. (2022). Pengembangan Social dan Pembangunan Pendidikan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 74–84. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.217>
- Simarmata, J., Riyanti, R., Ansya, Y. A., Suhada, S., Nggilu, A., Sihotang, D. O., ... Tarigan, I. M. B. (2026). *Pengajaran dan Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis. Retrieved from <https://scholar.google.com/scholar?cluster=6600669701156852831&hl=en&oi=scholar>
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Yulfianti, Y., Marlin, Y., Marsidin, S., & Irsyad, I. (2025). Peran Inkrimental Kepala Sekolah Dalam Pengambilan Keputusan Efektif Di Smk Negeri 1 Pariaman. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 10(4), 2437–2444. <https://doi.org/10.34125/jkps.v10i4.1258>